

**PERANAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PADA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN DAERAH**

**Vety Muna Waroh<sup>1</sup>, Habi Bullah<sup>2</sup>**  
Universitas Trunojoyo Madura<sup>1,2</sup>  
Email : vetymunawaraho@gmail.com

***Abstract***

*The Planning, Development, Research and Regional Agency (Bapperida) was formed based on the needs, development and progress of the government sector and specifically assists regional governments in implementing development in the government sector. Responsibility accounting is an accounting system that assigns responsibility to a responsibility center which will ultimately be measured to determine the performance of the center concerned. The research used in this article is descriptive with a qualitative approach. Based on the results obtained from Bapperida Pamekasan's calculations and the results of the author's interview, it can be explained that in 2021 the percentage was 87.01%, in 2022 the level of effectiveness experienced a quite drastic increase, namely 8.09% to 95.10%. In 2023 the level of effectiveness will decrease by 2.1% to 97.20%, this exceeds the percentage value of the level of effectiveness in 2021. So the trend in the role of cost responsibility accounting in the Planning, Development, Research and Regional Agency of Pamekasan Regency can be said to be in the criteria effective so the results of this study are considered positive.*

***Keywords:*** Responsibility accounting, Bappeda

**1. PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, adalah media untuk melaporkan sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Bapperida Kabupaten Pamekasan melaksanakan rencana strategis dan memenuhi kebutuhan perubahan di masyarakat (Lubis et al., 2023). Pemerintah merupakan lembaga publik yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan kinerjanya. Salah satu fungsi pemerintah adalah pelaporan keuangan, dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Armanda Yusram Teruna, 2022).

Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan daerah (BAPPERIDA) dibentuk untuk mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan sektor pemerintahan. Dalam hal ini, Bapperida membantu dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan anggaran dan belanja daerah (Lubis et al., 2023). Peran akuntansi dalam memperoleh informasi sangatlah mendesak. Pencapaian peran akuntansi dalam pemantauan biaya juga memerlukan peran berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang disebut akuntansi yang bertanggung jawab (Armanda Yusram Teruna, 2022).

Akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan sangat penting untuk aktivitas tersebut dan menentukan unit bisnis mana, terutama pusat laba, yang tidak beroperasi secara efektif. Departemen pendapatan pusat bertanggungjawab atas pendapatan penjualan internal. Kapan pendapatan dapat ditentukan dengan membandingkan target pendapatan dan pendapatan (Favian et al., 2021).

Kinerja perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka suatu organisasi perusahaan membutuhkan sistem yang diperlukan untuk menunjang kinerja manajemen suatu seluruhan organisasi ialah akuntansi prtanggungjawaban dengan menetapkan penghasilan

serta biaya pilihan bagi pusat dengan tanggungjawab yang bersangkutan (Wasih Latuh Rahmi, Daffa UlhaQ, 2023) .

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang memberikan tanggungjawab terhadap suatu pusat pertanggungjawaban yang pada akhirnya akan diukur untuk menentukan kinerja pusat yang bersangkutan (Fitriyah & Siregar, 2021). Akuntansi pertanggungjawaban dapat memantau seluruh aktivitas organisasi, mengidentifikasi unit kerja mana yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut, dan menentukan organisasi mana yang tidak beroperasi secara efisien.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah metode akuntansi manajemen yang bertujuan untuk mendukung manajemen kinerja melalui akuntabilitas biaya dan pendapatan. Tanggung jawab pengeluaran dan pendapatan dikoordinasikan menurut berbagai tingkat struktur organisasi. Sistem anggaran yang transparan memungkinkan tanggung jawab manajemen direncanakan dan laporan manajemen dihasilkan mengenai kinerja setiap pusat tanggung jawab terhadap rencana tersebut (SURYANI et al., 2022).

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang tepat dalam organisasi atau aktivitas bisnis lainnya memperjelas peran setiap organisasi atau pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas operasinya, karena terdapat struktur organisasi yang mencakup tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini membuat persiapan menjadi lebih mudah karena anggaran ditujukan untuk menentukan peran masing-masing manajer dalam kinerja kegiatan organisasi, maka anggaran dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja manajer dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi bisnis (Hasna & Rachman, 2020).

### **Manfaat Menggunakan Akuntansi Pertanggungjawaban**

Manfaat dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat disimpan dalam bentuk informasi historis, yang juga berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan memotivasi manajer. Oleh karena itu, informasi akuntansi pertanggungjawaban ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja manajer pusat, dan juga sebagai motivasi bagi manajer pusat biaya terkait (Jusmani & Mursalin, 2020).

Akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan suatu organisasi mencatat seluruh aktivitasnya, mengetahui bagian atau departemen mana yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut, dan menentukan bagian atau departemen mana yang tidak berfungsi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, ini adalah metode yang paling banyak digunakan.

Akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan manajemen untuk lebih efektif mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada manajer tingkat bawah tanpa secara langsung mengawasi seluruh aktivitas perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban juga harus menilai apakah akuntansi dengan mudah mengalokasikan biaya yang dikeluarkan kepada personel di pusat pertanggungjawaban. Menerapkan akuntansi akuntabilitas yang tepat membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaannya (Wandari & Sujana, 2021).

Akuntansi Pertanggungjawaban memudahkan manajer untuk memantau dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas dan permasalahan dalam perusahaan. Pemimpin bisnis menugaskan bidang wewenang dan tanggungjawab kepada manajer dibawahnya. Pusat pertanggungjawaban terdiri dari wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan dan bertugas mengendalikan berbagai bagian yang terkait dengan tanggungjawab tersebut. mengambil tanggungjawab memungkinkan manajer mengendalikan biaya. Informasi ini diharapkan dapat membantu perusahaan mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban dan mengambil keputusan yang lebih akurat (Fitriyah & Siregar, 2021).

### **Pengendalian Biaya**

Menurut Garrison, pengendalian adalah tentang apa yang telah dicapai, apa yang menjadi standarnya, apa yang dilakukan adalah implementasinya, dan evaluasi terhadap implementasi adalah tentang memperbaiki agar tetap pada jalurnya, yaitu agar sesuai dengan standar tersebut adalah proses memutuskan apa yang harus dilakukan. Umumnya perusahaan memantau biaya untuk mengendalikan biaya dalam menjalankan aktivitas agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien (Andara et al., 2023).

Pengendalian biaya, bertanggungjawab terhadap pengendalian sebaiknya diberikan kepada individu-individu tertentu yang memiliki tanggung jawab atas anggaran biaya. Manajer yang memiliki tanggungjawab atas biaya maupun pendapatan sebaiknya dibatasi atas pengendalian tersebut. pada umumnya, kinerja manajer diukur dengan membandingkan antara biaya serta pendapatan aktual dengan anggaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting system). Untuk memudahkan akuntan dalam mengendalikan biaya, bisa menggunakan jumlah biaya yang sudah di tetapkan sebelumnya atau biasa disebut dengan biaya standar. Nantinya, biaya tersebut digunakan sebagai dasar bagi anggaran dan laporan biaya (Dimas Muhmmad Rizal, 2024)

### **Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja adalah proses pemantauan dan pelaporan hasil operasional secara terus menerus, terutama kemajuan menuju tujuan yang direncanakan. Perhatian besar yang diberikan pada pengukuran kinerja berasal dari keyakinan bahwa pengukuran kinerja meningkatkan efisiensi, efektivitas, penghematan, dan produktivitas dalam organisasi sektor publik. Kinerja keuangan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu daerah. indikator kinerja keuangan memungkinkan mengukur seberapa baik suatu daerah mengelola keuangannya, termasuk kemampuannya menghasilkan pendapatan, belanja secara efisien, mengelola utang, dan melakukan pengelolaan aset yang baik (Ramadana et al., 2023).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur finansial dan non finansial untuk menilai akuntabilitas lembaga/organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk mengkomunikasikan secara memadai kepada masyarakat bagaimana dana digunakan, termasuk kewajiban untuk mengkomunikasikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien (Zulkarnain Zulkarnain, 2020).

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Objek Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada kantor Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Pamekasan, yang bergerak di bidang pembangunan daerah dan berlokasi di Jl. Balaikambang No.1a, Rw.06, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi.

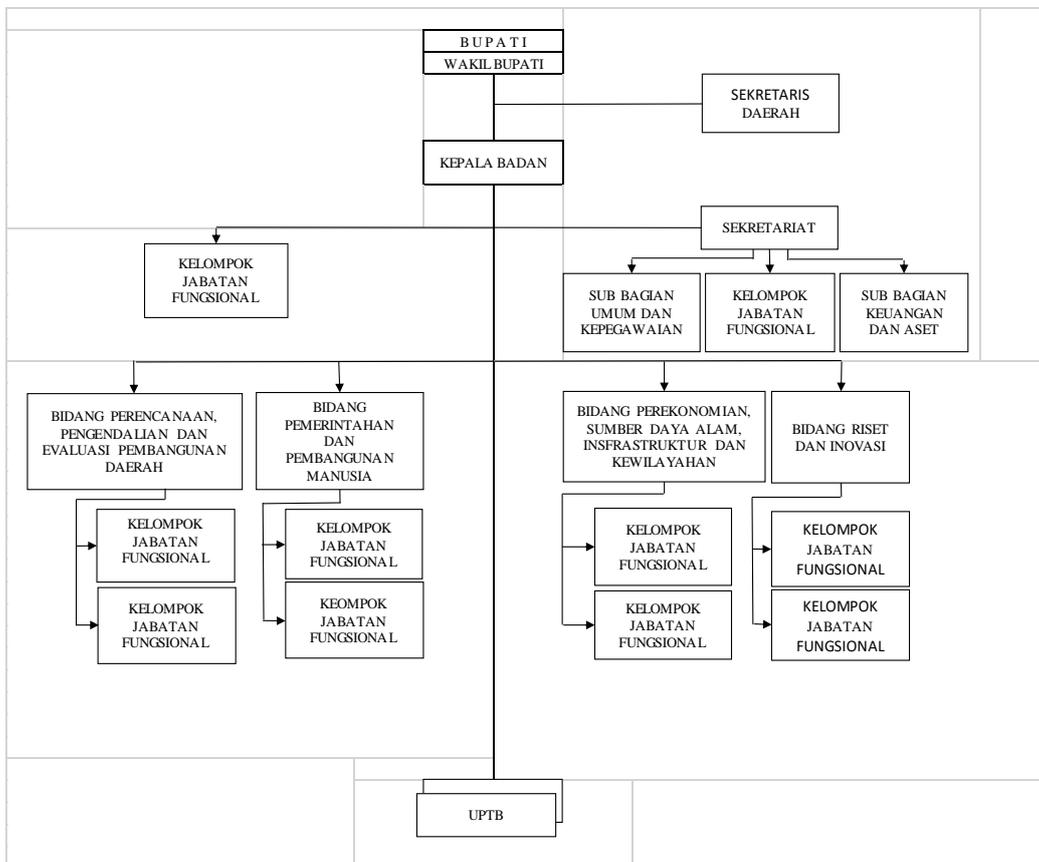
**Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara  
Wawancara dihasilkan dengan bertanya kepada Kasubbag Keuangan dan Aset atau pegawai Bapperida
- b. Observasi  
Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan pada kantor Bapperida dengan keikutsertaan dalam beberapa kegiatan perusahaan sehingga bisa diketahui secara langsung penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan pada kantor Bapperida.
- c. Dokumentasi  
Data yang dapat diperoleh dari dokumentasinya, yaitu laporan keuangan pada tahun 2021-2023 dan rencana anggaran biaya pada tahun 2021-2023. Dokumentasi membantu penulis untuk mengkaji lebih dalam evaluasi akuntansi pertanggungjawaban pada Kantor Bapperida Pamekasan.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Akuntansi Pertanggungjawaban Biaya Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Daerah Kabupaten Pamekasan**

Pada Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Daerah kabupaten Pamekasan Organisasi telah jelas menggambarkan jenjang wewenang, tanggung jawab, tugas dan kewajiban setiap tingkatan kantor dengan baik. Dan telah merumuskan dengan jelas fungsi-fungsi pokok, tugas dan tanggung jawab unit kerja. Hal ini terlihat dari pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk setiap tingkat manajemen serta hubungan kerja yang terstruktur antar bagian dalam lembaga.



**Anggaran**

Anggaran memiliki beberapa fungsi, pertama perencanaan, yaitu anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti dan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam unit dan uang. Kedua yaitu pengendalian, adanya anggaran memaksa para manajer untuk mengoordinasikan rencana dan aktivitas. Ketiga yaitu pengawasan, anggaran harus dapat dijadikan alat bantu manajemen dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sekaligus mengendalikan operasi. Keempat yaitu komunikasi, anggaran dapat meningkatkan komunikasi dalam organisasi yang efisien. Fungsi terakhir anggaran yaitu evaluasi, ketika anggaran sedang dirumuskan, sektor publik menganalisis rencana untuk masa depan dan menyeraikan perkiraan sesuai kebutuhan (Munawarah & Darmayanti, 2024).

**Realisasi Anggaran Pada Bapperida Pamekasan Tahun 2021-2023**

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2021	8.363.100.062.00	7.277.002.617.00	87,01 %	Cukup Efektif
2022	8.593.800.292.00	8.172.445.280.00	95,10 %	Efektif
2023	7.965.427.605.00	7.742.464.651.00	97,20 %	Efektif

Tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil, semakin tinggi tingkat efektivitas berarti akan semakin baik dan semakin rendah tingkat efektivitas berarti semakin buruk. Berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan diatas pada Bapperida Pamekasan dan hasil wawancara penulis maka dapat dijelaskan bahwa pengukuran tingkat efektivitas diketahui melalui tingkat antara realisasi pendapatan asli desa dengan hasil kekayaan desa.

Berdasarkan hasil olah data diatas mengenai tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran BAPPERIDA Kabupaten Pamekasan untuk periode 2021 hingga 2023 dapat diketahui bahwa tingkat presentase memperoleh hasil yang berubah-ubah tiap tahunnya. Pada tahun 2021 persentase sebesar 87,01 %, pada tahun 2022 tingkat efektivitas mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 8,09 % menjadi 95,10 %. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sedikitnya penggunaan realisasi pada tahun 2021 daripada realisasi yang digunakan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 tingkat efektifitas mengalami penurunan sebesar 2,1% menjadi 97,20%, hal ini melebihi nilai persentase tingkat efektifitas pada tahun 2021. Dengan demikian, peran akuntansi pertanggungjawaban biaya di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat dinilai efektif, sehingga hasil penelitian ini dianggap positif.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai selisih persentase sebesar 8,09% dari tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,1%. Hal tersebut dikarenakan kecilnya penggunaan realisasi 2022 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut jika dilihat secara keseluruhan dari periode 2021 hingga 2023, tingkat anggaran biaya (BAPPERIDA) Kabupaten Pamekasan berada dalam keadaan baik bahkan mendekati sangat baik, walaupun tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan dan penurunan nilai persentase efektifitas. Namun, nilai tersebut masih berada dalam kategori efisien.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh (BAPPERIDA) Kabupaten Pamekasan juga bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari anggaran yang digunakan untuk menjalankan program yang direncanakan sebelumnya tidak mendekati nilai realisasi dan masuk ke dalam kategori efisien. Selain itu, pengelolaan anggaran dalam periode 2021 hingga 2023 bisa dikatakan konsisten karena mendapatkan nilai kategori efektif tiap tahunnya.

Dalam penelitian ini, juga terdapat wawancara yang ditujukan Kasubbag Keuangan dan Aset di Bapperida Pamekasan. Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada narasumber mencakup berbagai aspek. Narasumber diminta untuk menjelaskan bagaimana sistem pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Bapperida Pamekasan. Selain itu, mereka juga diminta untuk menjelaskan apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban di kantor Bapperida telah sesuai atau tidak dengan teori akuntansi Pertanggungjawaban. Selanjutnya, narasumber diminta untuk menjelaskan apakah ada tantangan khusus dalam menerapkan konsep akuntansi pertanggungjawaban biaya di lingkungan Bapperida Pamekasan, dan bagaimana cara mengatasinya. Dan terakhir, narasumber diminta untuk menjelaskan bagaimana peran akuntansi pertanggungjawaban biaya dalam aktivitas sehari-hari di Bapperida Pamekasan.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Aset Bapperida mengenai hal apa saja yang harus dilengkapi pada Bapperida Pamekasan, Kasubbag Keuangan dan Aset menyatakan :

*”Dengan memonitoring dan mengevaluasi secara triwulan, kepala badan dapat memastikan pencapaian kegiatan dan penggunaan anggaran oleh setiap bidang di Bapperida. Ini memungkinkan identifikasi efisiensi anggaran, misalnya jika anggaran yang diajukan adalah Rp.30.000.000.00, namun kegiatan dapat dilakukan dengan biaya Rp.20.000.000.00. meskipun ada penurunan anggaran, kegiatan tetap bisa dilakukan dan menunjukkan efisiensi.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipaparkan bahwa dalam sistem pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Bapperida Pamekasan dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan mengevaluasi setiap triwulan atau per triwulan sehingga kepala badan dapat memonitoring pencapaian kegiatan dan serapan anggaran yang telah dilakukan oleh bidang-bidang di Bapperida. Sehingga nantinya ketahuan anggaran itu dapat terlaksana dengan tugas-tugas dan fungsi di setiap bidang. Dan akan ketahuan juga cukup tidaknya anggaran sehingga akan di perbaiki di triwulan berikutnya, apakah anggaran itu perlu ditambah atau dikurangi. Terkait evaluasi pengukuran kinerja efisiensi anggaran dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi, bedanya adalah pada anggaran, yakni kebutuhan yang diusulkan oleh bidang misal Rp.30.000.000, ketika dilaksanakan dengan target kinerja yang sama di 2 dokumen untuk Rp.30.000.000 ternyata bidang mampu melaksanakan kegiatan tersebut dengan output kegiatan 2 dokumen Rp.20.000.000, sehingga ada efisiensi Rp.10.000.000. walaupun anggarannya berkurang terkena refocusing namun output kegiatan atau sub kegiatan yakni 2 dokumen tetap dapat dilaksanakan sehingga dalam monitoring dan evaluasi tersebut bisa disimpulkan terjadi efisiensi anggaran pada sub kegiatan yang dievaluasi per triwulan. Selain itu sesuai tidaknya penerapan akuntansi pertanggungjawaban di kantor Bapperida dengan teori akuntansi Pertanggungjawaban, seperti hasil wawancara berikut ini :

*”sesuai, karena sudah memenuhi beberapa peranan antara lain, Akuntabilitas dimana disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan. Dan juga Manajerial untuk membantu para pengguna laporan keuangan serta transparansi untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.”*

Terdapat beberapa tantangan khusus dalam menerapkan konsep akuntansi pertanggungjawaban biaya di lingkungan Bapperida Pamekasan, dan bagaimana cara mengatasinya yang diungkapkan narasumber :

*”Perubahan terus-menerus dalam regulasi keuangan daerah, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, memerlukan waktu bagi para pengelola keuangan untuk beradaptasi. Kurangnya SDM yang paham tentang akuntansi keuangan dan kekurangan sarana serta prasarana untuk sistem pengelolaan keuangan daerah masih*

menjadi masalah. Dan cara mengatasi yaitu dengan pengelola keuangan perlu beradaptasi dengan perubahan peraturan baik dari pusat maupun daerah, dan diperlukan SDM dengan latar belakang akuntansi dan peningkatan sarana serta prasarana untuk sistem pengelolaan keuangan daerah.”

Terakhir narasumber mengungkapkan bagaimana peran akuntansi pertanggungjawaban biaya dalam aktivitas sehari-hari di Bapperida Pamekasan yaitu :

“Akuntansi Pertanggungjawaban Biaya sangat penting dalam aktivitas sehari-hari Bapperida Pamekasan untuk mengelola dan memonitor pengeluaran dana secara efisien. Prosedur pembukuan termasuk penyusunan LPJ oleh Bendahara Pengeluaran setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. Selain itu Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ dan berkonsultasi.pertanggungjawaban administratif dilakukan melalui LPJ yang mencakup anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran, serit dilampiri dokumen seperti BKU dan Laporan Penutupan Kas, disertai dengan berita acara pemeriksaan kas oleh atasan langsung setiap tiga bulan.”

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya dan kinerja manajerial pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Daerah (BAPPERIDA) rata-rata jawaban responden terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban mendapatkan respon yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Daerah (BAPPERIDA) Pamekasan sudah berjalan dengan sangat baik dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil, semakin tinggi tingkat efektivitas berarti akan semakin baik dan semakin rendah tingkat efektifitas berarti semakin buruk.

## SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti terbatasnya akses artikel untuk tinjauan literatur dan kurangnya wawancara. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah artikel dari berbagai jurnal dan narasumber untuk informasi yang lebih banyak. Analisis mendalam terhadap anggaran dan realisasi, serta identifikasi penyebab perubahan efektivitas anggaran antara tahun 2021 hingga 2023 perlu dilakukan untuk peningkatan berkelanjutan. Dengan ini, Bapperida Pamekasan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta memastikan penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andara, A. P., Juliaty, Y. S., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban dan Teknologi Informasi Pengendalian Biaya pada PDAM Tritanadi Cabang Tuasan Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 551–563.
- Armada Yusram Teruna, M. Y. N. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 16(1), 61–69. <https://doi.org/10.33373/mja.v16i1.4212>
- Dimas Muhmmad Rizal, S. A. (2024). *Pengantar Akuntansi Biaya*. Anak Hebat Indonesia. <https://www.gramedia.com/products/pengantar-akuntansi-biaya-1>

- Favian, H., Sabijono, H., & Tirayoh, V. ictorina Z. (2021). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 536–542.
- Fitriyah, Y. A., & Siregar, H. O. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Perilaku Biaya Pada Perusahaan Start Up. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 182–186. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2756>
- Hasna, D. L., & Rachman, R. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada Pt. Taspen (Persero) Kc Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 67–76. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.422>
- Jusmani, J., & Mursalin, M. (2020). Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Pengendalian Biaya Administrasi dan Umum. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(1), 43. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i1.4335>
- Lubis, K. F., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). 1667-Article Text-12243-2-10-20221026. 4(3), 538–547.
- Munawarah, M., & Darmayanti, C. (2024). Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pada BAPPEDA Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(1), 211–218. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i1.2409>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- SURYANI, S., MULYADI, M., & FEBRINA, R. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Kompetensi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pt. Pulau Sambu Group. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 11–25. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i2.1784>
- Wandari, N. K. H. A., & Sujana, E. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD Kab Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(01), 713–722.
- Wasih Latuh Rahmi, Daffa UlhaQ, N. N. (2023). Jurnal Ilmu Kompuer, Ekonomi dan Manajemen. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 4038.
- Zulkarnain Zulkarnain. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 3(1), 61–74. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v3i1.40>